

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

## BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Otto Iskandardinata No 278, ☎ (0262) 2801834 Garut

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### RINGKASAN EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Organisasi.....	4
1.2 Aspek Strategis yang Berpengaruh.....	12
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
 <b>II. PERENCANAAN STRATEJIK</b>	
2.1 Perencanaan .....	17
2.2 Perjanjian Kinerja .....	22
 <b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	30
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.2.1 Pengukuran Indikator Kinerja (IKU).....	32
3.2.2 Analisa Capaian Kinerja .....	34
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	51
 <b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>57</b>

### LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (TAPKIN/PK) Tahun 2015

Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Lampiran 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Lampiran 4. Perhitungan Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Stratejik

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017” Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Badan Pendapatan Daerah ini merupakan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan tahun kedua RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019.

LKIP disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2017 diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai salah satu prasyarat untuk terwujudnya organisasi pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip *good governance*.

Untuk menuju kearah organisasi pemerintahan yang dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan para *stake holdernya*, maka ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan LKIP ini, meliputi:

1. Tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Program kerja yang menjadi isu strategis pembangunan daerah;
3. Aktivitas organisasi yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Kami berharap penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2017 dapat digunakan sebagai perangkat evaluasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggungjawab.

Garut, Februari 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN GARUT

**U. BASUKI EKO, SH, MH**  
NIP. 19661230 199703 1 002

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut merupakan cakupan siklus lengkap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, persetujuan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019 menetapkan visi yaitu ” ***Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas***” yang dijabarkan kedalam dua misi pembangunan. Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut menetapkan 2 sasaran pembangunan sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017-2019.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2017, pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah, rata-rata mencapai sasaran sebesar 26.35% atau “*Melampaui Target*” dengan kriteria “**Baik**”.
- Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah, rata-rata mencapai sasaran atau “*Mencapai Target*” dengan kriteria “**Baik**”.

Pada Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 – 2019 telah melaksanakan 1 program pembangunan dan 6 program kesekretariatan yang diwujudkan kedalam 59 kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan dapat diketahui bahwa rata-rata mencapai target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi dan

efektifitas terhadap program pembangunan melalui pengukuran *input*, *output* dan *outcome*, capaian indikator kinerja seluruhnya adalah “Efisien dan Efektif”.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sepanjang tahun anggaran 2017 tidak terlepas dari berbagai kendala baik yang disebabkan faktor eksternal maupun internal. Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target kerja 2017 antara lain:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah belum menyentuh seluruh komponen masyarakat wajib pajak karena keterbatasan anggaran dan SDM
- Belum optimalnya pembinaan, monitoring dan pengawasan kegiatan sehubungan dengan keterbatasan petugas teknis dan wilayah kerja yang luas,
- Tidak semua kegiatan yang telah direncanakan dalam RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA/RKT dapat dilaksanakan karena keterbatasan ketersediaan anggaran pemerintah daerah,
- Belum optimalnya koordinasi ditingkat perencanaan dan pelaksana kebijakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah belum seluruhnya berkesinambungan dengan kegiatan yang dilaksanakan propinsi/pusat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif yang dapat meminimalisasi hambatan/kendala di dalam pencapaian target. Untuk tahun anggaran berikutnya perlu dilakukan evaluasi dan analisis kinerja dengan lebih intensif sehingga memungkinkan mengidentifikasi sejumlah celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja yang lebih efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan para *stakeholder*. Hal tersebut perlu diwujudkan dengan tetap berlandaskan pada Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik

Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan antara lain:

- Mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan aparatur serta peningkatan jumlah tenaga teknis;
- Optimalisasi pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara sesuai ketersediaan anggaran;
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- Meningkatkan sinergitas antara perencanaan dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah;
- Meningkatkan koordinasi ditingkat perencanaan dan pelaksana kebijakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan propinsi/pusat.

Demikian Ringkasan Eksekutif ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan pedoman untuk arah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masa yang akan datang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap SKPD untuk menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan *good governance*.

Laporan Kinerja mencakup siklus lengkap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan strategik, perencanaan kinerja, persetujuan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah memiliki fungsi utama sebagai :

- Umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait
- Alat perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah
- Media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif
- Media pertanggungjawaban kepada publik

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), menumbuhkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga mampu beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya Laporan Kinerja juga diharapkan dapat memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah; dan untuk memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017, mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 s/d 27 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
24. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Nomor 050.13/38/Bapenda/2017 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019

### **1.1. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI**

Pengembangan Aparatur Negara diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan dukungan Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam suatu sistem Administrasi Negara yang makin handal, profesional dan strategis.

Dalam merespon dan melakukan pengendalian terhadap perubahan lingkungan strategis, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah, melakukan pengukuran kinerja sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Garut.

Dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan perubahan pada struktur Organisasi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yaitu yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Garut maka susunan organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Garut, terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Sub Bidang dan 3 (tiga) Sub Bagian, dengan uraian sebagai berikut :

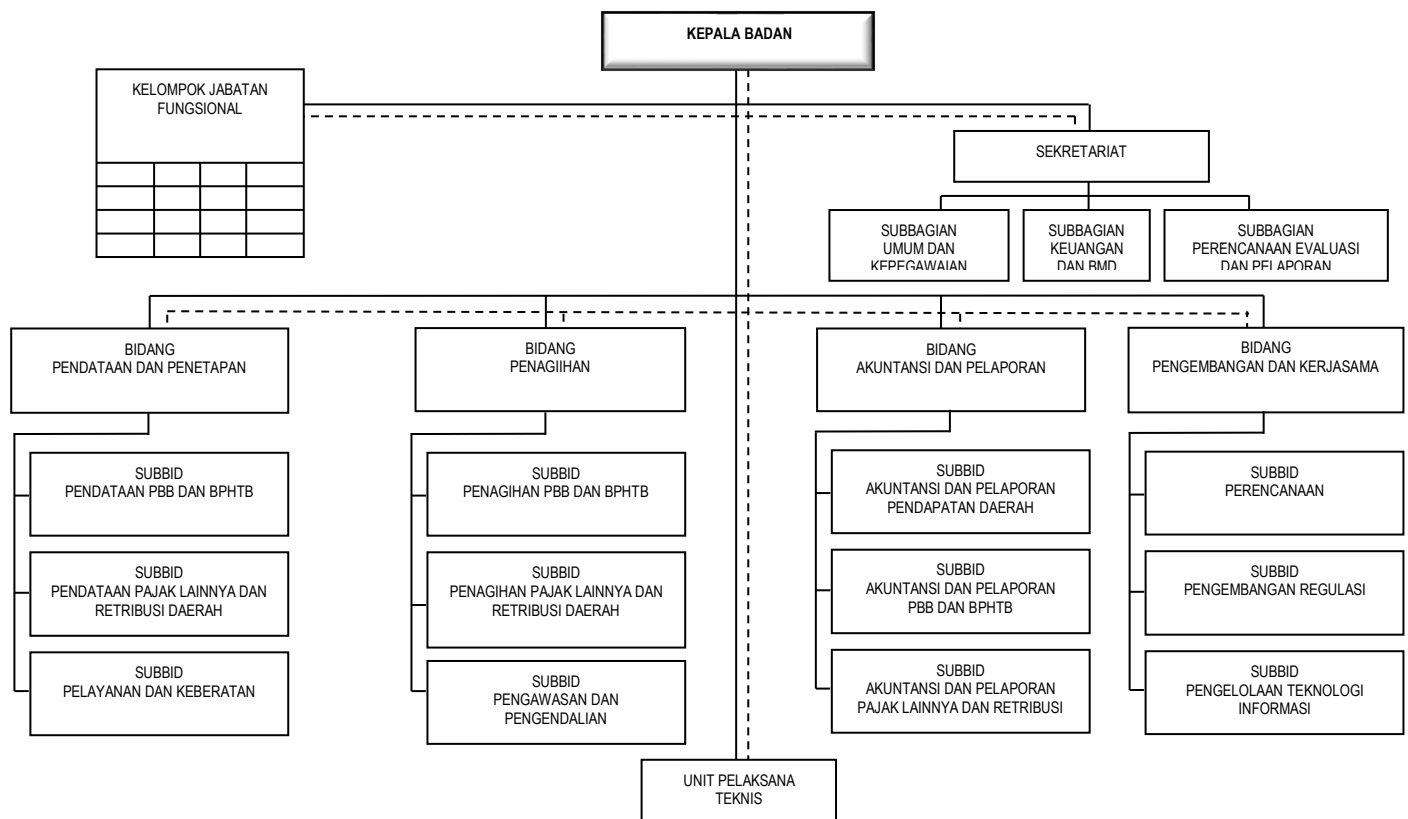
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan BMD;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
  - a. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB;
  - b. Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
  - c. Subbidang Pelayanan dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan, terdiri dari :
  - a. Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB;
  - b. Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
  - c. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.
5. Bidang Pengembangan dan Kerjasama, terdiri dari :
  - a. Subbidang Perencanaan;
  - b. Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
  - c. Subbidang Pengelolaan Informasi Teknologi (IT).
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

- a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak lainnya dan Retribusi Daerah;
  - b. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
  - c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan pendapatan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
  8. Unit Pelaksana Teknis Badan

Gambar 1  
Struktur Organisasi

### Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.



## 1. SUMBER DAYA ORGANISASI

### 1) Personil

Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 92 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan 6 orang Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS).

**TABEL 1.1.**  
**SUSUNAN PEGAWAI**  
**BERDASARKAN ESELONERING**

Nomor	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Ila	-	
2	Ilb	1	
3	IIla	1	
4	IIlb	4	
5	IVa	15	
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	

**TABEL 1.2**  
**SUSUNAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	67	
2	Perempuan	25	
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>	

**TABEL 1.3**  
**SUSUNAN PEGAWAI**  
**BERDASARKAN PENDIDIKAN**

Nomor	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S 2	9	
2	S 1	50	
3	D 3	7	
4	D 1	-	
5	SLTA	25	
6	SLTP	1	
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>	

**TABEL 1.4**  
**SUSUNAN PEGAWAI**  
**BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG**

Nomor	Pangkat / Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Madya / IVd	-	
2	Pembina Utama Muda / IVc		
3	Pembina Tk. I / IVb	1	
4	Pembina / IVa	3	
5	Penata Tk. I / III d	3	
6	Penata / III c	9	
7	Penata Muda Tk. 1 / III b	24	
8	Penata Muda / III a	24	
9	Pengatur Tk. I / II d	3	
10	Pengatur / II c	11	
11	Pengatur Muda Tk. I / II b	8	
12	Pengatur Muda / II a	5	
13	Juru Tk I / I d	-	
14	Juru / I c	1	
15	Juru Muda Tk.I, I/b	-	
16	Juru Muda / I a	-	
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>	

**Tabel 1.5**  
**Pegawai Bapenda Kabupaten Garut (berdasarkan Eselon)**

Eselon	Formasi	Terisi	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
II/b	1	1	1	0
III/a	1	1	1	0
III/b	4	4	4	0
IV/a	15	15	12	3
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>

*Sumber : Sekretariat Bapenda, Tahun 2017*

## 2) Perlengkapan dan Asset

Dalam menunjang tugas pokok dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut

### a. Tanah

**TABEL 1.6**  
 LUAS TANAH DAN BANGUNAN

No	Nama Barang	Luas (M <sup>2</sup> )	Lokasi/Penggunaan
1	Tanah	3.500 m <sup>2</sup>	Jl. Otto Iskandardinata
2	Bangunan untuk tempat kerja	1.150 m <sup>2</sup>	

### b. Kendaraan

**TABEL 1.7**  
 KENDARAAN

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	
	a. Mini bus	8 Unit
	b. Pick up	3 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	66 Unit
Jumlah		77 Unit

### c. Perlengkapan Kantor

**TABEL 1.8**  
 PERLENGKAPAN KANTOR

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Buah	1
2	Alat Penghancur Kertas	unit	2
3	Amplifier	unit	1
4	Brankas	Buah	3

5	Camera Digital	buah	2
6	Dispencer	buah	6
7	Facsimile	unit	1
8	Filling Besi/Metal	buah	10
9	Hard Disk External – Server	unit	1
10	Jam Elektronik	buah	1
11	Keyboard	unit	2
12	Kipas Angin	unit	2
13	Kursi kayu/Rotan/Bambu	Buah	2
14	Kursi Lipat	Buah	15
15	Kursi Rapat	buah	5
16	Kursi Tamu	Stel	2
17	Lain-lain Alat Dapur	paket	1
18	Lain-lain Alat Kantor Lainnya	paket	10
19	Lain-lain Alat Pembersih	unit	1
20	Lain-lain Alat Pemeliharaan Tanaman	paket	1
21	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	paket	1
22	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	m'	10
23	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	buah	3
24	Lain-lain Jaringan Listrik Sambungan	paket	8
25	Lain-lain Komputer Unit untuk	paket	7
26	Lain-lain Peralatan Mini Komputer	paket	5
27	Lain-lain Perkakas Konstruksi Logam	Buah	1
28	Laptop	paket	1
29	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	paket	4
30	Lemari Besi/Metal	Buah	1
31	Lemari Es	unit	2
32	Lemari Kaca	buah	2
33	Lemari Kayu	Buah	5
34	Lemari Makan	buah	1
35	Meja 1/2 Biro	buah	19
36	Meja Kerja	set	4



37	Meja Podium	Buah	1
38	Meja Rapat	Buah	3
39	Meja Tulis	Buah	30
40	Mesin Absensi	unit	3
41	Mesin Hitung Elektronik	buah	2
42	Mesin Hitung Manual	paket	2
43	Mesin Ketik Elektronik	unit	1
44	Mesin Ketik Manual Stanclar (14-16)	Buah	2
45	Mesin Pelubang	unit	2
46	Mesin Potong Rumput	unit	1
47	Mic Conference	unit	1
48	Monitor – PC	unit	1
49	Note Book	unit	10
50	Papan Visual	buah	5
51	PC Unit ( Client )	paket	10
52	PC Unit ( Stand Alone )	Unit	26
53	Pesawat Telephone	Buah	1
54	Peti Uang	buah	1
55	Photo	buah	6
56	Power Supply	paket	2
57	Printer	buah	10
58	Proyektor +Attachment	buah	2
59	Rak Kayu	Buah	4
60	Scanner	paket	1
61	Server	unit	3
62	Sice	Buah	1
63	Sofa	set	2
64	Software Cont off-line computer	paket	1
65	Sound System	unit	2
66	Stabilisator	unit	2
67	Tabung Gas	paket	1
68	Televisi	Buah	5

69	White Board	buah	2
70	Wireless Mic	paket	1

Perlengkapan (Aset) Bapenda terdiri dari :

- Aset tetap terdiri dari tanah dan gedung kantor di Simpang Lima Jl. Otto Iskandardinata No. 278 Garut;
- Peralatan Kantor, Sarana Prasarana Pelayanan, Sarana Pungutan, Meubelair, Perangkat IT, Sistem IT SIPKD, SIP PBB, e-PAD, Mesin Porporasi, Cash Register, Genset, dll;

Nilai Aset sarana dan Prasarana (angka sebelum rekonsiliasi) pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.658.613.747,00.

## **1.2 Aspek Strategis yang Berpengaruh**

### **1. Aspek Legalisasi**

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsinya, baik sebagai SKPD pemungut pajak daerah maupun sebagai koordinator bagi 12 SKPD penghasil retribusi daerah, mempunyai batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam :

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Garut.

Selain aturan-aturan diatas, pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 juga dipengaruhi oleh beberapa perubahan aturan, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Nomor 587 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut;
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- d. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

## 2. Aspek Kelembagaan

Pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku secara efektif mulai bulan Januari 2017.

Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu unsur badan, dengan perubahan aturan diatas mengalami perubahan yang signifikan. Badan Pendapatan Daerah terbentuk dari pemisahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang terdiri dari 2 bidang yaitu bidang pendataan dan penetapan dan bidang penagihan. Tahun 2016 menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru yang terdiri dari sekretariat dengan 4 bidang yang dibentuk diantaranya sebagai pelaksanaan penetapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya perubahan ini, Badan Pendapatan Daerah harus melakukan beberapa penyesuaian terutama dalam persiapan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang

memadai serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang baik, guna kelancaran pelaksanaan SOTK dengan tugas pokok dan fungsi yang baru.

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut bahwasanya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mempunyai **tugas pokok dan fungsi memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan pendapatan daerah yang meliputi Kesekretariatan, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengembangan dan Kerjasama.**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang pendapatan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Akuntansi dan Pelaporan, Pengembangan dan Kerjasama;
3. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pendataan dan penetapan, penagihan, akuntansi dan pelaporan, pengembangan dan kerjasama, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dengan berpedoman pada kebijakan umum daerah;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Badan;
5. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan LKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga dan menyajikan urutan tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Sistematika penulisan LKIP terdiri atas :

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

### PERENCANAAN STRATEGIS

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana . Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

- *Rencana Strategis*: Uraian singkat tentang rencana strategis instansi mulai dan visi-misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.
- *Rencana Kinerja*: Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan terutama dalam mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran kerja bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

## **PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN

##### 1. Rencana Strategis

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Stratejik Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019 telah disusun sebagai langkah perencanaan yang efektif guna mencapai tujuan dan sasaran, didalamnya terkandung pernyataan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai berikut :

##### a. Pernyataan Visi

***“ Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas”.***

##### b. Pernyataan Misi

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah :

1. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah

2. Meningkatkan Pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja serta sumber daya aparatur yang profesional

**c. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang harus diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.1

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Terwujudnya Peningkatan Target Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan PAD

**d. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	Persentase Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah



#### **e. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

##### **1. Strategi**

- a. Menggali sumber-sumber potensi pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan;
- c. Perbaikan pengendalian aparatur perpajakan;
- d. Penyediaan logistic pajak daerah;
- e. Menyiapkan regulasi bidang perpajakan
- f. Pelaksanaan integrasi teknologi yang menyeluruh;

##### **2. Kebijakan**

- a. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah;
- b. Peningkatan Ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi;
- c. Peningkatan efektifitas pengawasan untuk menambah tingkat kepatuhan Wajib;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pajak daerah;
- e. Peningkatan kepastian hukum bagi aparatur pengelola pajak dan wajib pajak;
- f. Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Pendapatan melalui Penggunaan Teknologi Informasi;

## **2. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH**

Untuk memetakan lingkungan strategis yang berpengaruh, maka dilakukan Analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) sebagai berikut:

### **1. Faktor Lingkungan Internal :**

#### **a. Kekuatan (Strength)**

1. Adanya Sistem Teknologi Informasi (IT) terutama informasi perpajakan diantaranya SIP PBB, ePAD, SIPKD dan tapping Box;
2. Pimpinan yang visible;
3. Tersedianya anggaran / dana yang memadai;

4. Adanya Peraturan Daerah/Bupati bidang perpajakan sebagai dasar hukum;
5. Motivasi kerja pegawai baik;
6. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Dispenda.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Sistem pendataan belum efektif
2. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
3. Kualitas pelayanan belum optimal
4. Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
5. Lemahnya penegakan aturan
6. Responsibilitas dan responsivitas rendah.

2. Faktor Lingkungan Eksternal :

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
2. Dukungan Eksekutif dan Legislatif
3. Perkembangan PDRB dan income perkapita positif
4. Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
5. Kondisi sosial aman dan kondusif
6. Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
7. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer
8. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
9. Kesiediaan pihak ketiga dalam pengelolaan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
10. Bantuan dan insentif dari Pemerintah Pusat

b. Ancaman (*Threat*)

1. Kondisi sosial politik tidak stabil;
2. Kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu dengan hujan sepanjang tahun apalagi Kabupaten Garut termasuk daerah rawan longsor;
3. Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan retribusi daerah;
4. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah.

### 3. Penganggaran

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Badan Pendapatan Daerah mendapat alokasi anggaran yang terdiri Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Anggaran Belanja Bapenda Kabupaten Garut  
Tahun Anggaran 2017

Jenis Belanja	Tahun 2017
Belanja Tidak Langsung	12.665.114.911,00
Belanja Langsung	7.966.633.316,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.631.748.227,00</b>

Sumber : Sekretariat Bapenda, Tahun 2017.

Dalam kegiatan Belanja Langsung terdiri dari 7 Program dan 59 Kegiatan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini adalah untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana secara optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana secara optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada DPPKA melalui program pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyelenggaraan sosialisasi.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana secara optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan program ini adalah mewujudkan akuntabilitas dari capaian terhadap target kinerja dan realisasi keuangan.

6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Tujuan program ini adalah mewujudkan pelaksanaan kegiatan SKPD yang sesuai dengan perencanaan.

7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan program ini adalah meningkatkan realisasi pendapatan daerah, penataan barang milik daerah dan legalisasi pengelolaan keuangan daerah dari mulai tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mencakup **Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan** yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra). Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program dan kegiatan disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan

Sesuai dengan DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017 dialokasikan untuk Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Rp. 7.966.633.316,00. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah tahun 2017 sesuai anggaran tersebut, maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut khususnya dari Belanja Langsung yang dituangkan dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkat 7,9%	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan	Persentase peningkatan Objek dan subjek pajak daerah baru (Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah)	182.325.000
			Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Jumlah basis data objek dan subjek PBB P2 (bangunan standar) yang akurat di 19 desa	116,275,000
			Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2	Jumlah Updating data objek pajak PBB P2 yang beralih fungsi (bangunan non standar)	66,050,000
			Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan	Prosentase peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak	1.350.396.200
			Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	Jumlah Kecamatan dan desa yang dibina	387,875,200
			Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dibina	323,592,000
			Cleansing data piutang pajak PBB P2	Jumlah kecamatan penyelesaian piutang PBB	62,000,000
			Penertiban Pajak Daerah	Jumlah wilayah kecamatan penertiban pajak daerah	287,936,000
			Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang meningkat kesadaran dan kepatuhannya	166,638,000
			Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Jumlah Aparatur tingkat SKPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah	122,355,000
			Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pajak daerah	1.261.269.280
			Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana administrasi pengelolaan pajak daerah dan jumlah wajib pajak daerah lainnya	315,195,000
			Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Jumlah desa dan kelurahan penerima sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	200,859,050
			Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Jumlah wilayah penyebaran sarana administrasi PBB, SPPT dan DHKP	158,920,000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2017

			Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Jumlah sarana administrasi jenis pajak daerah lainnya	174,895,230
			Penyediaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak kecamatan	182,450,000
			Penyediaan SPPT PBB P2	Jumlah SPPT wajib pajak Kecamatan, desa dan kelurahan yang diterbitkan	187,450,000
			Pemuktahiran Database Pajak Daerah	Jumlah sarana penunjang input data	41,500,000
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan</b>	<b>Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah</b>	<b>401.900.000</b>
			Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Jumlah laporan database pajak PBB P2 yang aman	50,950,000
			Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Jumlah laporan database pajak daerah lainnya	248,500,000
			Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah tenaga outsourcing pengelola aplikasi pajak daerah	102,450,000
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan</b>	<b>persentase peningkatan perencanaan dan regulasi</b>	<b>398.060.000</b>
			Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	71,870,000
			Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Jumlah produk hukum Pajak daerah	138,450,000
			Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan	Jumlah wilayah KCP BJB integrasi data pajak daerah	62,555,000
			Penyampaian informasi Pajak Daerah	Jumlah sekolah dan Perguruan tinggi dalam penyampaian informasi pajak daerah	71,350,000
			Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pajak dan retribusi daerah	53,835,000
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori BB	<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>persentase aparatur yang memiliki kompetensi pelayanan pajak daerah</b>	<b>49,050,000</b>
			Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak	Jumlah peserta Bimbingan teknis pelayanan pajak	49,050,000
			<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>Persentase aparatur yang bersertifikat penyidik pajak dan penilai PBB</b>	<b>40,000,000</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti	40,000,000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2017

--

<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu</b>	<b>22,334,000</b>
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pemenuhan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	22,334,000
<b>Peningkatan Perencanaan SKPD</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan tepat waktu</b>	<b>32,753,750</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	32,753,750
<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pertanggungjawaban pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah</b>	<b>535.000.000</b>
Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Jumlah pembukuan pajak dan retribusi daerah	52,000,000
Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah laporan pajak dan retribusi daerah	91,400,000
Evaluasi pendapatan daerah	Jumlah laporan evaluasi pendapatan daerah	124,450,000
Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	175,000,000
Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Jumlah dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB	92,150,000
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,625,764,782.</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	15,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon dan air	66,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	107,006,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pegawai cleaning servis	18,950,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	277,820,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	134,466,812
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tambahan jumlah komponen instalasi listrik	25,180,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tambahan Jumlah peralatan kantor	522,739,970
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar selama 1 tahun	27,252,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan pelaksanaan makan	163,950,000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2017

			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar kabupaten	160,000,000
			Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	Jumlah TKK yang aktif di Bapenda	62,400,000
			Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya	Jumlah tenaga keamanan kantor	45,000,000
			<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>64.850.000</b>
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian seragam batik pegawai	32,850,000
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi pegawai yang beroperasi di Bapenda	32,000,000
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori Baik	<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan indek kepuasan masyarakat</b>	<b>730.480.950</b>
			Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Jumlah Tenaga Kerja outsourcing administrasi pelayanan PBB yang memadai	212,375,000
			Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Persentase penanganan keberatan dan pelayanan Subjek dan Objek pajak daerah yang terpenuhi	284,849,950
			Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	Jumlah Aparatur Pajak yang diberi penghargaan	233,256,000
			<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>1.272.449.354</b>
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah ruangan yang dilengkapi perlengkapan gedung kantor	249,450,000
			Pengadaan Mebeulair	Jumlah Mebeulair yang terealisasi	180,959,354
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	89,140,000
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Yang dipelihara	195,000,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah ruangan pelayanan yang direhab	200,000,000
			Pembuatan Detail Enggeneering Design (DED) Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan gedung yang direhabilitasi	40,000,000
			Penambahan Lokal Ruang Gedung kantor	Jumlah ruangan baru yang dibangun	51,450,000
			Penataan Interior Gedung Kantor	Jumlah interior gedung pelayanan yang dipasang	200,000,000
			Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah nama identitas kantor yang terpasang	66,450,000



**Tabel 2.5**  
**Anggaran Program dan Kegiatan**

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>4.03.4.03.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7,966,633,316.00</b>
<b>4.03.4.03.02.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1,625,764,782.00</b>
4.03.4.03.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15,000,000.00
4.03.4.03.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	66,000,000.00
4.03.4.03.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	107,006,000.00
4.03.4.03.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	18,950,000.00
4.03.4.03.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	277,820,000.00
4.03.4.03.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	134,466,812.00
4.03.4.03.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25,180,000.00
4.03.4.03.02.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	522,739,970.00
4.03.4.03.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27,252,000.00
4.03.4.03.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	163,950,000.00
4.03.4.03.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KONSULTASI KE LUAR DAERAH	160,000,000.00
4.03.4.03.02.01.019.	PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TENAGA TEKNIS / ADMINISTRASI	62,400,000.00
4.03.4.03.02.01.024.	PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PELAKSANA TEKNIS LAINNYA	45,000,000.00
<b>4.03.4.03.02.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1,272,449,354.00</b>
4.03.4.03.02.02.004.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG/KANTOR	249,450,000.00
4.03.4.03.02.02.007.	PENGADAAN MEUBEULAIR	180,959,354.00
4.03.4.03.02.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	195,000,000.00
4.03.4.03.02.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	89,140,000.00
4.03.4.03.02.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200,000,000.00
4.03.4.03.02.02.021.	PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESAIN (DED) REHABILITASI/PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	40,000,000.00
4.03.4.03.02.02.024.	PENAMBAHAN LOKAL RUANGAN GEDUNG KANTOR	51,450,000.00
4.03.4.03.02.02.027.	PENATAAN INTERIOR GEDUNG KANTOR	200,000,000.00
4.03.4.03.02.02.045.	PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR	66,450,000.00
<b>4.03.4.03.02.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>64,850,000.00</b>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2017

4.03.4.03.02.03.001.	PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI	32,000,000.00
4.03.4.03.02.03.005.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	32,850,000.00
<b>4.03.4.03.02.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>22,334,000.00</b>
4.03.4.03.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	22,334,000.00
<b>4.03.4.03.02.07.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD</b>	<b>32,753,750.00</b>
4.03.4.03.02.07.001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	32,753,750.00
<b>4.03.4.03.02.08.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>40,000,000.00</b>
4.03.4.03.02.08.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40,000,000.00
<b>4.03.4.03.02.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>4,908,481,430.00</b>
4.03.4.03.02.17.040.	PENGELOLAAN APLIKASI SIP PBB	212,375,000.00
4.03.4.03.02.17.049.	PENYAMPAIAN SARANA ADMINISTRASI PBB, SPPT DAN DHKP	158,920,000.00
4.03.4.03.02.17.050.	PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH	174,895,230.00
4.03.4.03.02.17.051.	PEMBINAAN DAN MONITORING PAJAK DAERAH	323,592,000.00
4.03.4.03.02.17.054.	PENERTIBAN PAJAK DAERAH	287,936,000.00
4.03.4.03.02.17.055.	PENGAWASAN PAJAK DAERAH	166,638,000.00
4.03.4.03.02.17.063.	PENGELOLAAN PENANGAN KEBERATAN DAN PENGADUAN PAJAK	284,849,950.00
4.03.4.03.02.17.064.	PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	315,195,000.00
4.03.4.03.02.17.065.	PENYEDIAAN DHKP PBB-P2	182,450,000.00
4.03.4.03.02.17.066.	PENYEDIAAN SPPT PBB-P2	187,450,000.00
4.03.4.03.02.17.092.	PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB P2	116,275,000.00
4.03.4.03.02.17.093.	PEMUTAKHIRAN DATABASE PAJAK DAERAH	41,500,000.00
4.03.4.03.02.17.099.	PENGELOLAAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	52,000,000.00
4.03.4.03.02.17.103.	PELAPORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	91,400,000.00
4.03.4.03.02.17.110.	EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	124,450,000.00
4.03.4.03.02.17.111.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGELOLA PAJAK	49,050,000.00
4.03.4.03.02.17.114.	KOORDINASI DAN REKONSILIASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	62,555,000.00
4.03.4.03.02.17.115.	PENYAMPAIAN INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	71,350,000.00
4.03.4.03.02.17.116.	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	53,835,000.00
4.03.4.03.02.17.118.	PEMELIHARAAN APLIKASI PENDAPATAN DAERAH	50,950,000.00
4.03.4.03.02.17.119.	PENGEMBANGAN APLIKASI PAJAK DAERAH (TI)	248,500,000.00
4.03.4.03.02.17.120.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN HADIAH BAGI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH (PELAYANAN IBADAH)	233,256,000.00

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2017*

4.03.4.03.02.17.122.	PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI PBB DAN BPHTB	387,875,200.00
4.03.4.03.02.17.127.	REKONSILIASI PENDAPATAN DAN PIUTANG PBB DAN BPHTB	175,000,000.00
4.03.4.03.02.17.128.	OPTIMALISASI PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PBB DAN BPHTB	92,150,000.00
4.03.4.03.02.17.129.	CLEANSING DATA PIUTANG PAJAK PBB-P2	62,000,000.00
4.03.4.03.02.17.130.	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG ADMINISTRASI PBB	200,859,050.00
4.03.4.03.02.17.132.	PENDATAAN INDIVIDUAL SUBJEK DAN OBJEK PBB P2	66,050,000.00
4.03.4.03.02.17.133.	INTENSIFIKASI POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	122,355,000.00
4.03.4.03.02.17.135.	PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP PERENCANAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	71,870,000.00
4.03.4.03.02.17.136.	PENYUSUNAN REGULASI PENDAPATAN DAERAH	138,450,000.00
4.03.4.03.02.17.137.	PENGLOLAAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	102,450,000.00

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 untuk Target Jumlah PAD adalah sebesar Rp. 110.476.840.3670,00 namun dengan ditetapkannya DPPA pada APBD Perubahan Tahun 2017 target tersebut disesuaikan menjadi Rp.

119.976.840.367,00; sedangkan Pagu Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya 7 Program dan 59 Kegiatan pada anggaran murni sebesar Rp. 7.413.583.316,00 namun dengan ditetapkannya DPPA Perubahan Tahun 2017 pagu tersebut disesuaikan menjadi Rp.7.966.633.316,00.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan akhir tahun; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2017, yaitu Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2017 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu Kegiatan yang dapat berupa fisik dan /atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output Kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) yang berkaitan dengan kegiatan tahun anggaran 2017 tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\frac{\% \text{ Pencapaian Target}}{100} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\% \text{ Pencapaian Target}}{100} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan **asumsi** sebagai berikut :

- X ≥ 85 % : Baik**  
**71% ≤ X < 85% : Cukup**  
**56% ≤ X < 70% : Kurang**  
**X < 56% : Sangat Kurang**

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. **Analisis efisiensi** dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

**Analisis efektivitas** yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil ( *outcomes* ). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja ( *performance gap* ) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

### 3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan tupoksinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tupoksi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam media Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini agar pada akhirnya akan diketahui persentase tingkat capaian terhadap sasaran dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017.

Dalam Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, secara berturut-turut sebagai berikut :

#### 3.2.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah, pada tahun 2017 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terwujudnya Peningkatan target Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja : Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah.

Target kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2017 yang berhubungan dengan pendapatan daerah ditetapkan meningkat sebesar 7,9 %. Dengan melihat realisasi angka pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 127.811.212.975,00 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar

Rp.101.115.726.519,00 dapat disimpulkan bahwa pendapatan secara keseluruhan dapat melampaui target Renstra yaitu meningkat 26,40%.

Sasaran ini meliputi 5 sub indikator kinerja (merupakan indikator program) diantaranya :

1. Persentase peningkatan Objek dan subjek pajak daerah baru (Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang ditargetkan sebesar 100% dan mencapai target 100%.
2. Prosentase peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebesar 80% sehingga mencapai target sebanyak 80%.
3. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pajak daerah sebesar 80 % sehingga mencapai target 100%.
4. Persentase tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah sebesar 85 % dan mencapai target sebesar 85%.
5. Persentase peningkatan perencanaan dan regulasi sebanyak 12 dokumen dan tersedia sebanyak 12 dokumen sehingga mencapai sasaran sebanyak 100%.

2. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah

Sasaran 2 rata-rata mencapai sasaran sebesar 100% atau "Mencapai Target".

Sasaran ini terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.

Sasaran ini meliputi 5 sub indikator kinerja (merupakan indikator program) diantaranya :

- a. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi pelayanan pajak daerah yang ditargetkan sebesar 10% dan mencapai target 10%.
- b. Persentase aparatur yang bersertifikat penyidik pajak dan penilai PBB yang ditargetkan sebesar 35% dan tidak mencapai target (0%).
- c. Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu yang ditargetkan sebesar 100% dan mencapai target 100%.
- d. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan tepat waktu yang ditargetkan sebesar 100% dan mencapai target 100%.
- e. Persentase pemenuhan pertanggungjawaban pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditargetkan sebesar 100% dan mencapai target 100%.

- f. Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditargetkan sebesar 100% dan mencapai target 100%.
  - g. Persentase peningkatan disiplin aparatur yang ditargetkan sebesar 100% dan mencapai target 100%.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran ini meliputi 2 sub indikator kinerja (merupakan indikator program) diantaranya :

- a. Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat yang ditargetkan sebesar 80% dan mencapai target 100%.
- b. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang ditargetkan sebesar 100% dan mencapai target 100%.

Lebih lengkapnya tentang pengukuran pencapaian sasaran dapat dilihat pada Lampiran 2: Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2017

### 3.2.2 Analisa Capaian Kinerja

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang pencapaiannya belum optimal. Terhadap sasaran yang belum tercapai secara optimal akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

#### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2017)

Dalam bagian ini akan diuraikan target dan realisasi kinerja Pendapatan Daerah, termasuk jenis penerimaan yang menjadi tupoksi Bapenda sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap Target dan Realisasi Kinerja yang terkait dengan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Daerah, dalam kerangka pelaksanaan APBD Kabupaten Garut Tahun 2017, sebagai berikut :

-----  
Sasaran 1: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah  
-----

Sasaran 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah terdiri dari satu indikator yaitu Persentase peningkatan



pajak daerah dan retribusi daerah Hasil dari indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 333,60% atau “*Mencapai Target*” dengan kriteria “**Baik**”. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 1.

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2017	Target Tahun 2017	Tingkat Capaian 2017 thd Target (%)	Tercapai/ Tidak **)
1	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	26,35%	7,9%	333,60%	√
	Pajak Daerah	35,57%	7,9%	450,28%	√
	Retribusi Daerah	(17,04)	7,9%	(215,64)	X
	Rata-rata	26,35%	7,9%	333,60%	√

**Ket :** √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Penjelasan indikator tersebut sebagai berikut:

**Indikator Kinerja : Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah**

Pada tahun 2017, capaian indikator persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat dengan mencapai 26,35% realisasi persentase peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah ini berasal dari pajak daerah sebesar 35,57 % dan dari retribusi daerah sebesar (17,04)%. Penerimaan ini berasal dari Pajak daerah sebesar Rp. 113.065.315.111,00 dan retribusi daerah sebesar Rp. 14.745.897.864,00

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Garut Tahun 2017**

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	141.082.218.889	127.811.212.975	90,59
I	Pajak Daerah	119.976.840.367	113.065.315.111	94,24
II	Retribusi Daerah	21.105.378.522	14.745.897.864	69,87
	<b>Jumlah</b>	<b>141.082.218.889</b>	<b>127.811.212.975</b>	<b>90,59</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan adalah Rp.127.811.212.975,00 atau 90,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 141.082.218.889,00 terdiri dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.113.065.315.111,00 atau 94,24% dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.14.745.897.864 atau 69,87%.

Penjelasan capaian masing-masing komponen dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari 11 jenis Pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu :

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB P2, BPHTB, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Pajak Daerah  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	8,000,000,000.00	7,229,140,123.00	90.36%
2	Pajak Restoran	11,000,000,000.00	11,831,635,663.00	107.56%
3	Pajak Hiburan	3,200,000,000.00	3,270,710,409.00	102.21%
4	Pajak Reklame	3,700,000,000.00	3,565,823,805.00	96.37%
5	Pajak Penerangan Jalan	26,500,000,000.00	26,778,744,254.00	101.05%
6	Pajak Parkir	450,000,000.00	372,447,956.00	82.77%
7	Pajak Air Tanah	4,000,000,000.00	919,082,004.00	22.98%
8	Pajak Sarang Burung Walet	10,780,000.00	11,050,000.00	102.50%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,850,000,000.00	3,052,492,741.00	107.11%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan	36,993,209,183.00	37,694,268,214.00	101.90%
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	23,272,851,184.00	18,339,919,942.00	78.80%

- Berdasarkan data di atas tidak semua Pajak Daerah dapat mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan, yang disebabkan karena :

a. Pajak Hotel

kurang intensifnya penjadwalan untuk monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap objek - objek Pajak Hotel di Wilayah Kabupaten Garut. Potensi yang dapat tertagih merupakan data hotel tahun-tahun sebelumnya dan belum ada penambahan objek pajak hotel baru. Penetapan target tidak berbanding lurus dengan potensi dan perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Garut. Pada tahun 2017 berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut bahwa tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Pajak Reklame

Beberapa hal yang menyebabkan antara lain karena berkurangnya pesanan reklame/spanduk dari penyelenggaraan kegiatan dan adanya kegiatan penataan kota terkait dengan lokasi yang dapat dipasang reklame serta penataan objek-objek reklame yang sudah ada. Dampak penegakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan oleh Pemerintah Pusat, mengakibatkan produsen rokok yang berizin sulit untuk menggunakan/memasang media reklame untuk mempromosikan produknya di wilayah Kabupaten Garut. Juga implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) yang mengakibatkan larangan pemasangan reklame pada tempat – tempat strategis, sehingga mengurangi potensi pajak reklame.

c. Pajak Air Bawah Tanah

Belum dilakukan penjadwalan untuk pendataan kembali terhadap objek-objek pajak pajak air bawah tanah mengingat pajak air tanah kewenangan penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan perubahan regulasi terkait hal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Badan Pendapatan belum menggali secara aktif potensi pajak air tanah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, yang mengakibatkan berpindahnya 18 wajib Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Provinsi dalam hal pemungutannya

d. Pajak Parkir

Belum intensifnya penjadwalan untuk pengawasan kembali terhadap objek- objek Pajak Parkir di Wilayah Kabupaten Garut. Potensi yang dapat tertagih merupakan data tahun-tahun sebelumnya.

Perlu dilakukan pembinaan terhadap wajib pajak pengelola parkir dikarenakan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak parkir masih rendah. Pajak yang disetorkan ke kas daerah belum sesuai dengan omzet pengelolaan parkir.

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bahwa BPHTB terjadi akibat adanya jual beli tanah dan/atau bangunan. Pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB dalam jual beli tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Garut masih terdapat perbedaan pelaksanaan, salah satunya dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adapun hasil dari verifikasi adalah dasar dalam menentukan NJOP pajak BPHTB dalam jual beli tanah dan/atau bangunan adalah nilai transaksi.

Karena adanya kecenderungan untuk tidak mencantumkan harga transaksi yang riil/sebenarnya;

Realisasi pajak BPHTB tergantung kepada peralihan hak yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak dapat diprediksi secara akurat.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, yang dipungut oleh 12 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Target dan Realisasi Retribusi Daerah  
Kabupaten Garut Tahun 2017

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>5,644,838,390.00</b>	<b>5,233,019,110.00</b>	<b>92.70%</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	323,950,000.00	351,801,750.00	108.60%
2	Retribusi Pelayanan Pengangkutan Persampahan / Kebersihan	387,020,000.00	369,307,000.00	95.42%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2017

3	Retribusi Pelayanan Persampahan	36,778,400.00	36,778,400.00	100.00%
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1,150,000,000.00	768,268,000.00	66.81%
6	Retribusi Pelayanan Pasar ( pengambilan sampah)	99,396,000.00	68,068,000.00	68.48%
7	Retribusi Pelataran/Tampakan	165,888,000.00	185,374,200.00	111.75%
8	Retribusi Los	112,212,000.00	246,012,400.00	219.24%
9	Retribusi Kios	830,739,600.00	748,984,700.00	90.16%
10	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,595,000,000.00	1,852,438,600.00	116.14%
11	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3,633,000.00	4,143,300.00	114.05%
12	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	37,746,390.00	38,000,000.00	100.67%
13	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12,550,000.00	12,570,000.00	100.16%
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	881,925,000.00	543,272,760.00	61.60%
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>4,906,886,333.00</b>	<b>4,250,080,170.00</b>	<b>86.61%</b>
15	Sewa Tanah dan Bangunan	863,916,640.00	665,145,000.00	76.99%
16	Sewa Tanah dan Bangunan Jalan	25,840,241.00	40,509,205.00	156.77%
17	Sewa Tanah dan Bangunan (Irigasi)	93,125,030.00	90,134,215.00	96.79%
18	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pasar Hewan)	45,272,000.00	46,902,000.00	103.60%
19	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat)	228,997,995.00	257,800,000.00	112.58%
20	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (MCK)	42,822,000.00	46,088,700.00	107.63%
21	Sewa Gedung / Ruang / Aula dan Asrama	-	-	-
22	Sewa Laboratorium	39,123,700.00	53,050,000.00	135.60%
23	Retribusi Terminal	255,000,000.00	254,514,800.00	99.81%
24	Retribusi Tempat Khusus Parkir	205,000,000.00	166,216,000.00	81.08%
25	Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa	1,725,624,054.00	1,114,495,000.00	64.59%
26	Retribusi Rumah Potong Hewan	71,517,000.00	74,252,250.00	103.82%
27	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	436,247,673.00	386,423,500.00	88.58%
28	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Rekreasi)	650,000,000.00	829,454,500.00	127.61%
29	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (BBI)	61,000,000.00	61,495,000.00	100.81%
30	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah / Pertanian	163,400,000.00	163,600,000.00	100.12%
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>10,553,653,799.00</b>	<b>5,262,798,584.00</b>	<b>49.87%</b>
31	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10,050,000,000.00	4,673,611,637.00	46.50%
32	Retribusi Izin Gangguan	78,424,500.00	78,424,500.00	100.00%
33	Retribusi Izin Trayek	215,933,699.00	267,607,547.00	123.93%
34	Retribusi Izin Usaha Perikanan	400,000.00	1,200,000.00	300.00%
35	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	208,895,600.00	241,954,900.00	115.83%

**Retribusi Daerah** terdiri dari 35 jenis pungutan retribusi, keseluruhannya ditargetkan sebesar Rp. 21.105.378.522,00 dengan capaiannya realisasinya sebesar Rp 14.745.897.864,00 atau 69,87%.

Belum semua jenis Retribusi realisasinya memadai karena penerimaannya sangat tergantung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada

SKPD masing-masing. Pelayanan yang baik, cepat dan mudah akan mendorong masyarakat menggunakan layanan tersebut. Terdapat beberapa jenis retribusi yang tidak mencapai target yaitu :

**a. Retribusi Jasa Umum**, terdiri dari :

- 1) Penerimaan **Retribusi Pengangkutan Sampah** dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dari pagu anggaran Rp. 387.020.000,00 sampai dengan triwulan III dapat terealisasi sebesar Rp. 369,307,000.00,00 atau sebesar 95,42%. Hal ini diakibatkan terbatasnya sarana/armada pelayanan persampahan dan jasa umum lainnya.
- 2) Penerimaan **Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum** yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dari pagu anggaran Rp1.150.000.000,00, terealisasi sebesar Rp768.268.000,00, atau sebesar 66,81%. Hal ini di akibatkan dengan beralih fungsinya tempat lahan Parkir menjadi lahan pedagang kaki lima dan terganggunya lahan parkir menjadi pangkalan becak serta kurangnya sarana dan prasana penunjang kegiatan pemungutan Retribusi ini.
- 3) Penerimaan **Retribusi Kios** yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM dari pagu anggaran Rp830.739.600,00, terealisasi sebesar Rp748.984.700 atau sebesar 90,18%. Hal ini di akibatkan karena adanya revitalisasi beberapa pasar tradisional sehingga jumlah Kios menjadi sedikit karena dialihkan ke pasar sementara menjadi pedagang Los.
- 4) Penerimaan **Retribusi Menara Telekomunikasi** yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari pagu anggaran Rp881.925.000,00, realisasi sebesar Rp. 543.272.760,00 atau sebesar 61,60% Hal ini diakibatkan penagihan retribusi ini dilaksanakan oleh masing masing pemilik menara secara sekaligus mulai triwulan III dan IV dengan pertimbangan yaitu jumlah menara selalu mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan bangunan baru dan perubahan / alih kepemilikan menara.

**b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :**

- 1) Penerimaan **Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan** yang dikelola oleh BPKAD dari pagu anggaran Rp. 863,916,640.,00, terealisasi sebesar Rp. 665,145,000,00, atau sebesar 76,99%. Hal ini menunjukkan realisasi pada retribusi ini belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pembayaran sewa mengalami keterlambatan sehubungan dengan pembayaran dari beberapa penyewa akan dilakukan di awal tahun berikutnya.
- 2) Penerimaan dari **Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan Irigasi** yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari pagu anggaran Rp. 93.125.030,00, sampai dengan triwulan III dapat terealisasi sebesar Rp. 90,134,215,00 atau sebesar 96,79%. Hal ini menunjukkan realisasi pada retribusi ini sudah belum mencapai target anggaran yang seharusnya, dikarenakan pembayaran sewa mengalami keterlambatan sehubungan dengan pembayaran dari beberapa penyewa akan dilakukan di awal tahun berikutnya.
- 3) Penerimaan **Retribusi terminal** yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dari pagu anggaran Rp. 255.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.254.514.800,00, atau sebesar 99,81%. Hal ini diakibatkan dengan adanya pengalihan pengelolaan terminal dan sub terminal ke pemerintah pusat dan provinsi.
- 4) Penerimaan **Retribusi tempat khusus parkir** yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dari pagu anggaran Rp. 205.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 166.216.000,00 atau sebesar 81,081%. Hal ini menunjukkan target ini belum mencapai realisasi yang ditetapkan dikarenakan keterlambatan pembayaran dari para pengelola parkir di beberapa ruas tepi jalan.
- 5) Penerimaan **Retribusi tempat penginapan/pasangrahan/villa** yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari pagu anggaran Rp. 1.725.624.054,00 terealisasi sebesar Rp. 1,114,495,000,00 atau sebesar 64,59%. Hal ini dikarenakan pendapatan dari Cipanas Indah berkurang karena kalah bersaing dengan hotel dan tempat rekreasi yang dikelola pihak swasta dan sebagian penginapan di Hotel Cipanas Indah terjadi alih fungsi yaitu sebanyak 5 (lima) kamar dijadikan jalan pintas antara Cipanas-Rancabango/Tarogong. Selain daripada itu semakin banyaknya tempat

wisata yang dikelola pihak swasta dan perorangan yang fasilitasnya jauh lebih baik.

- 6) Penerimaan **Retribusi tempat rekreasi dan olahraga** yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari pagu anggaran Rp. 436,247,673,00 sampai dengan terealisasi sebesar Rp. 386,423,500,00, atau sebesar 88,58%. Hal ini diakibatkan minimnya sarana dan prasarana olahraga yang ada dan diharapkan adanya perubahan terkait sarana dan prasarana dari anggaran pemerintah Kabupaten Garut.

#### c. Retribusi perizinan Tertentu

- 1) Penerimaan **Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)** yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari pagu anggaran Rp10.050.000.000,00, terealisasi sebesar Rp4.673.611.637,00, atau sebesar 46,50%. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan IMB juga memproses IMB biasanya pemohon banyak di bulan juni dan seterusnya dan ketika IMB sudah dikeluarkan, pemohon sebagian besar tidak langsung membayar retribusinya.

### Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah

Sasaran 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah terdiri dari dua indikator yaitu (1) Nilai hasil evaluasi SAKIP, dan (2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian rata-rata mencapai sasaran kategori dengan kriteria **"Baik"**. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2017	Target Tahun 2017	Tingkat Capaian 2017 thd Target (%)	Tercapai/ Tidak **)
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		BB		
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,13	80	96,41%	Δ
	Rata-rata			96,41%	

**Ket:** √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.



Sebagaimana tabel diatas, pencapaian indikator sasaran 2 diukur dari 2 (dua) indikator yaitu nilai hasil evaluasi SAKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara rata-rata tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2017 dari dua indikator tersebut hampir mencapai realisasi yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 96.41%, masing-masing untuk nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori yang masih kosong karena menunggu penilaian yang dilaksanakan oleh Inspektorat kabupaten Garut. Sementara untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) peningkatan sebesar 96,41%.

Rincian penjelasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut:

**a. Indikator 1: Nilai Hasil Evaluasi SAKIP**

Pada tahun 2017 indikator nilai hasil evaluasi SAKIP ditentukan oleh penilaian dari Inspektorat Kabupaten Garut, sampai saat ini penilaian belum dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Garut, angka penilaian evaluasi SAKIP belum bisa ditampilkan di pencapaian indikator sasaran 2 sub indikator nilai hasil evaluasi SAKIP.

Kami menunggu hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut tentang penilaian akuntabilitas kinerja di Badan Pendapatan Daerah.

**b. Indikator 2: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pada tahun 2017, indikator nilai kepuasan masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 77,13 Apabila dibandingkan dengan target nilai IKM di tahun 2017 sebesar 74,05, Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2017 melebihi target dengan tingkat capaian mencapai 104,16%. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dengan nilai sebesar 80 pencapaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2017 baru mencapai target sebesar 92,56%.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Pendapatan Daerah berdasarkan data kuesioner yang terdiri dari 9 unsur pelayanan yang disebar kepada para wajib pajak sejumlah 150 responden dengan latar belakang objek pajak yang berbeda dan latar belakang jenjang pendidikan yang berbeda. Rata rata nilai yang dicapai atas pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah mencapai nilai 77,13 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,05.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) di Badan Pendapatan Daerah diantaranya adalah :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang refresentatif di Kantor Badan Pendapatan Daerah.
- b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pelayanan di kantor.
- c. Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Garut, dikarenakan luas wilayah yang besar dan jumlah kecamatan dan desa yang banyak terutama di wilayah Garut Selatan, telah dilaksanakan pelayanan pajak daerah keliling terutama pelayanan PBB yang dilaksanakan di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Garut Selatan. Meningkatnya sarana pelayanan PBB bagi para kolektor PBB di desa dan kolektor PBB di kecamatan

## 2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun- tahun sebelumnya.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya terlihat pada tabel berikut ini :

-----  
Sasaran 1: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah  
-----

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2016	Hasil Tahun 2017	Target Tahun 2017
1	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	10.99%	26,35%	7,9%
	Pajak Daerah	12,40%	35,57%	7,9%
	Retribusi Daerah	4,80%	(17,04)	7,9%
	Rata-rata	10.99%	26,35%	7,9%

---

**Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah**

---

**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2016	Hasil Tahun 2017	Target Tahun 2017
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP			BB
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		77,13	80

- Tabel tersebut di atas menggambarkan perkembangan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (kondisi awal dan tahun pertama pencapaian RPJMD dimana pada Tahun 2016 persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10,99%, Tahun 2017 meningkat menjadi 26,35% lebih (dengan pertumbuhan 333,60%)
  - Demikian pula halnya dengan sasaran strategis dengan indikator Nilai hasil evaluasi SAKIP, terus mengalami peningkatan dengan berupaya untuk mencapai kategori BB; begitu pula 1 (satu) sasaran strategis yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berupaya untuk mencapai indikator pelayanan BAIK.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (Tahun 2017) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra).
- Tabel berikut ini menggambarkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dibandingkan dengan Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2019.

---

**Sasaran 1: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah**

---

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Renstra**  
**Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Hasil sampai dengan 2017	Target Akhir RENSTRA
1	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	26,35%	7,96%
	Pajak Daerah	35,57%	7,96%
	Retribusi Daerah	(17,04)	7,96%
	Rata-rata	26,35%	7,96%

-----  
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah  
-----

**Tabel 3.9**  
**Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Renstra**  
**Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Hasil sampai dengan 2017	Target Akhir RENSTRA
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	B	BB
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,13	82

- Memperhatikan persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditargetkan pada akhir masa RPJMD Tahun 2018 mendatang sebesar 7,96%, sedangkan hasil sampai dengan tahun 2017 sebesar 26,35 % artinya persentase pajak daerah dan retribusi daerah telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Bapenda.
- Nilai hasil evaluasi SAKIP hampir mencapai target yang telah ditetapkan renstra yaitu kategori BAIK dan Nilai IKM yang harus dicapai untuk mewujudkan kategori baik dengan nilai 77,13 yang ditargetkan pada akhir masa RPJMD dengan nilai 82 Perlu kerja keras dan optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia, terutama SDM pengelola pelayanan pajak daerah yang kondisinya pada saat ini relatif rendah kompetensinya.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Pada Tahun ketiga masa pencapaian Target RPJMD Kabupaten Garut sebagaimana telah tertuang pula dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah, performa kinerja secara umum telah memenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari data yang telah disajikan pada uraian tersebut di atas, yang menunjukkan kecenderungan yang semakin baik khususnya terkait kinerja pemungutan PAD. Namun demikian bila dikaitkan dengan indikator tingkat kemandirian fiskal daerah maka Kabupaten Garut belum menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang membaik secara signifikan.

Berbagai faktor turut mempengaruhi kondisi sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

- a. Struktur Pendapatan Daerah yang sudah *given* dan tidak dapat diubah. Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut sebagai komponen terbesar dalam PAD sudah ditentukan (*close list*) dan tidak dapat ditambah bila tidak tercantum dalam undang-undang;
- b. Pemungutan pajak-pajak daerah yang belum optimal. Adanya sistem *self assesment* dalam pemungutannya membutuhkan keahlian dan kejelian petugas untuk melakukan pengawasan secara intensif dan mengambil langkah yang tepat untuk mengamankan penerimaannya. Pada sisi lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah.
- c. Kualitas sumber daya manusia pengelola PAD khususnya Pajak Daerah masih sangat lemah. Kompetensi yang dibutuhkan masih sangat jauh dari yang diharapkan dan sulit untuk melakukan terobosan dan inovasi. Tidak tersedianya tenaga PPNS dan kekurangan Juru Sita Pajak yang sangat diperlukan agar SOP Pemungutan Pajak dapat berjalan sesuai ketentuannya.
- d. Masih lemahnya regulasi di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah, perlu penyempurnaan segera agar dalam implementasi pemungutannya dapat lebih efektif.

Dengan berbagai kelemahan, kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini, maka berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan dengan strategi antara lain :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi antar SKPD dan pihak terkait;
- b. Melakukan kerjasama pemungutan, sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak dengan pihak Kejaksaan Negeri.
- c. Melakukan kajian untuk merevisi Peraturan Daerah di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.
- d. Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik baik di kantor maupun kegiatan lapangan.
- f. Mengikutsertakan pegawai Badan Pendapatan Daerah pada Bimbingan Teknis dan Diklat yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi.
- g. Meningkatkan pengendalian internal terhadap proses pemungutan dan pelaporan.
- h. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya kepastian penyaluran dana-dana transfer/bagi hasil.
- i. Meminta pendampingan dari BPKP dalam upaya mengoptimalkan PAD.
- j. Melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, baik perbankan maupun institusi pusat yang ada di daerah, seperti KPP Pratama Kabupaten Garut dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Jawa Barat, serta dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat meningkatkan potensi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.
- k. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai.

## **5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis efisiensi antara output dan input menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut berdasarkan output per unit kegiatan yang dihasilkan oleh suatu input.

Secara umum seluruh Program dan Kegiatan pada Tahun 2017 sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran yang ditetapkan. Realisasi keuangan secara akumulasi mencapai 93,15%,

terdiri dari 7 (Tujuh) Program yang terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) Kegiatan.

Pencapaian realisasi keuangan tersebut menggambarkan tingkat efisiensi yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yaitu hampir keseluruhan kegiatan secara fisik telah terlaksana, walaupun terdapat kegiatan yang secara keuangan belum direalisasikan, yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Efisiensi telah dilakukan dengan melakukan penghematan terhadap anggaran yang tersedia, sehingga secara fisik kegiatan terlaksana namun dengan penggunaan dana yang ekonomis.

Pencapaian sasaran kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 yang digambarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** melalui kegiatan rutin kantor dan administrasi pelayanan adalah sebesar **Rp. 1.479.188.989,00** dari pagu anggaran **Rp. 1.625.764.782,00** atau **90,98%**;
2. Pencapaian sasaran **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan anggaran **Rp. 1.272.449.354,00** terealisasi **Rp. 1.245.496.020,00** atau **97,88%**;
3. Terhadap sasaran **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan pagu anggaran sebesar **Rp.64.850.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 62.407.500,00** atau **96,23%**, untuk pengadaan pakaian seragam batik Bapenda dan pengadaan mesin absensi dalam rangka peningkatan disiplin pegawai;
4. Terhadap sasaran **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan** kapasitas SDM sehingga mencetak aparatur yang terlatih dan berkompentensi dalam pelayanan terhadap wajib pajak dengan anggaran **Rp.40,000,000,00** dan terealisasi **Rp.0,00** atau **0,00%**;
5. Terhadap sasaran tercapainya **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** yang indikator pemenuhan pelaporan pertanggungjawaban capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dengan anggaran sebesar **Rp.22,334,000,00** dan terealisasi sebesar **Rp.13,994,000,00** atau **62,66%**;

6. Terhadap sasaran tercapainya **Peningkatan Perencanaan SKPD** yang indikator pemenuhan dokumen Renja dan Renstra Bapenda dengan anggaran sebesar **Rp. 32,753,750,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 9,170,000,00** atau **28,00%**;
7. Terhadap sasaran tercapainya **Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase peningkatan Objek dan subjek pajak daerah baru (Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah), Prosentase peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pajak daerah, Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah, persentase peningkatan perencanaan dan regulasi, persentase aparatur yang memiliki kompetensi pelayanan pajak daerah, Persentase pemenuhan pertanggungjawaban pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan Persentase peningkatan indek kepuasan masyarakat dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.908.481.430,00** dan terealisasi **Rp. 4.808.507.631,00** atau **97.96%**.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Program Kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program Kerja menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Program yang secara langsung berhubungan dengan keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah **Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah** yang terdiri dari 32 Kegiatan dengan indikator kinerja adalah Persentase peningkatan Objek dan subjek pajak daerah baru (Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah), Prosentase peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pajak daerah, Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah, persentase peningkatan perencanaan dan regulasi, persentase aparatur yang memiliki kompetensi pelayanan pajak daerah, Persentase pemenuhan pertanggungjawaban



pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan Persentase peningkatan indek kepuasan masyarakat.

Dari 32 kegiatan tersebut seluruhnya merupakan kegiatan strategis dan sangat erat kaitannya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan dan menghimpun Pendapatan Daerah. Salah satu dari kegiatan tersebut lemah maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya dan output yang ingin dicapai. Kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan dalam mulai dari pendataan, pendaftaran dan penetapan, pelayanan, penagihan, pembayaran, monitoring dan evaluasi (termasuk analisis).

Selain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program lainnya merupakan program pendukung. Namun demikian tanpa program pendukung maka program strategis yang terkait dengan pencapaian kinerja organisasi tidak akan berhasil secara optimal.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 3.3.1 Pendapatan

Target pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 119.976.840.367,00. Jumlah pendapatan ini ditargetkan berasal dari hasil 11 jenis pajak daerah. Pada Tahun 2017, capaian pendapatan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 113.000.470.828,00 atau baru mencapai 94.19% dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Hal ini salah satunya diakibatkan penurunan tingkat kunjungan wisata ke Kabupaten Garut dan BPHTB yang terikat dengan proses jual beli sehingga terjadi penurunan pendapatan yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD.

Tabel 3.10  
Pendapatan Pajak Daerah  
Badan pendapatan Daerah Tahun 2017

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	119,976,840,367.00	113,000,470,828.00	94.19
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.06.	Pajak Hotel	8,000,000,000.00	7,229,140,123.00	90.36
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.07.	Pajak Restoran	11,000,000,000.00	11,831,635,663.00	107.56
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.08.	Pajak Hiburan	3,200,000,000.00	3,270,710,409.00	102.21
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.09.	Pajak Reklame	3,700,000,000.00	3,565,823,805.00	96.37

4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	26,500,000,000.00	26,778,744,254.00	101.05
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.11.	Pajak Parkir	450,000,000.00	372,447,956.00	82.77
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	4,000,000,000.00	919,082,004.00	22.98
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	10,780,000.00	11,050,000.00	102.50
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,850,000,000.00	3,052,492,741.00	107.11
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	36,993,209,183.00	37,629,423,931.00	101.72
4.03.4.03.02.00 .00.4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23,272,851,184.00	18,339,919,942.00	78.80

### 3.3.2 Belanja Daerah

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan, sehingga total realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 19.218.765.517,00 atau sebesar 93,15%

Tabel 3.11  
Belanja Badan pendapatan Daerah Tahun 2017

Jenis Belanja	Tahun 2017		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Tidak Langsung	12,665,114,911.00	11,600,001,377.00	91,59
Belanja Langsung	7,966,633,316.00	7,618,764,140.00	95,63
Jumlah	20,631,748,227.00	19,218,765,517.00	93,15

#### 3.3.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut berdasarkan DPPA APBD Garut Tahun 2017. Untuk Tahun 2017, Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebesar Rp. **12.665.114.911,00** dan terealisasi sebesar Rp. **11.600.001.377,00** atau sebesar 91.59%.

#### 3.3.2.2 Belanja Langsung

Belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. **7.966.633.316,00** dan terealisasi sebesar Rp. 7.618.764.140,00 atau terealisasi sebesar 95.63%. Realisasi yang tidak mencapai 100% salah satunya

disebabkan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang tidak direalisasikan dikarenakan penjadwalan pengirinan peserta diklat PPNS dan Penilai PBB harus disesuaikan dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dimana penjabaran teknis mengenai program, kegiatan dari belanja langsung sebagaimana yang tercantum dalam DPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Belanja Langsung**  
**Badan pendapatan Daerah Tahun 2017**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.03.4.03.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7,966,633,316.00	7,618,764,140.00	95.63
4.03.4.03.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,625,764,782.00	1,479,188,989.00	90.98
4.03.4.03.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15,000,000.00	2,448,000.00	16.32
4.03.4.03.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	66,000,000.00	56,564,576.00	85.70
4.03.4.03.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	107,006,000.00	102,506,000.00	95.79
4.03.4.03.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	18,950,000.00	18,933,700.00	99.91
4.03.4.03.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	277,820,000.00	276,582,354.00	99.55
4.03.4.03.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	134,466,812.00	131,877,948.00	98.07
4.03.4.03.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25,180,000.00	25,179,000.00	100.00
4.03.4.03.02.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	522,739,970.00	498,222,669.00	95.31
4.03.4.03.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27,252,000.00	24,981,000.00	91.67
4.03.4.03.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	163,950,000.00	97,235,000.00	59.31
4.03.4.03.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KONSULTASI KE LUAR DAERAH	160,000,000.00	141,758,742.00	88.60
4.03.4.03.02.01.019.	PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TENAGA TEKNIS / ADMINISTRASI	62,400,000.00	62,400,000.00	100.00
4.03.4.03.02.01.024.	PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PELAKSANA TEKNIS LAINNYA	45,000,000.00	40,500,000.00	90.00
4.03.4.03.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,272,449,354.00	1,245,496,020.00	97.88
4.03.4.03.02.02.004.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG/KANTOR	249,450,000.00	243,576,020.00	97.65
4.03.4.03.02.02.007.	PENGADAAN MEUBEULAIR	180,959,354.00	166,912,000.00	92.24
4.03.4.03.02.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	195,000,000.00	193,614,000.00	99.29
4.03.4.03.02.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	89,140,000.00	86,628,000.00	97.18
4.03.4.03.02.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200,000,000.00	198,955,000.00	99.48

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2017

4.03.4.03.02.02.021.	PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESAIN (DED) REHABILITASI/PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	40,000,000.00	39,545,000.00	98.86
4.03.4.03.02.02.024.	PENAMBAHAN LOKAL RUANGAN GEDUNG KANTOR	51,450,000.00	51,191,000.00	99.50
4.03.4.03.02.02.027.	PENATAAN INTERIOR GEDUNG KANTOR	200,000,000.00	199,090,000.00	99.55
4.03.4.03.02.02.045.	PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR	66,450,000.00	65,985,000.00	99.30
4.03.4.03.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	64,850,000.00	62,407,500.00	96.23
4.03.4.03.02.03.001.	PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI	32,000,000.00	31,157,500.00	97.37
4.03.4.03.02.03.005.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	32,850,000.00	31,250,000.00	95.13
4.03.4.03.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22,334,000.00	13,994,000.00	62.66
4.03.4.03.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	22,334,000.00	13,994,000.00	62.66
4.03.4.03.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	32,753,750.00	9,170,000.00	28.00
4.03.4.03.02.07.001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	32,753,750.00	9,170,000.00	28.00
4.03.4.03.02.08.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40,000,000.00	0.00	0.00
4.03.4.03.02.08.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40,000,000.00	0.00	0.00
4.03.4.03.02.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	4,908,481,430.00	4,808,507,631.00	97.96
4.03.4.03.02.17.040.	PENGELOLAAN APLIKASI SIP PBB	212,375,000.00	212,091,000.00	99.87
4.03.4.03.02.17.049.	PENYAMPAIAN SARANA ADMINISTRASI PBB, SPPT DAN DHKP	158,920,000.00	158,913,000.00	100.00
4.03.4.03.02.17.050.	PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH	174,895,230.00	172,912,681.00	98.87
4.03.4.03.02.17.051.	PEMBINAAN DAN MONITORING PAJAK DAERAH	323,592,000.00	317,008,000.00	97.97
4.03.4.03.02.17.054.	PENERTIBAN PAJAK DAERAH	287,936,000.00	286,666,500.00	99.56
4.03.4.03.02.17.055.	PENGAWASAN PAJAK DAERAH	166,638,000.00	165,718,000.00	99.45
4.03.4.03.02.17.063.	PENGELOLAAN PENANGAN KEBERATAN DAN PENGADUAN PAJAK	284,849,950.00	283,942,950.00	99.68
4.03.4.03.02.17.064.	PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	315,195,000.00	312,051,000.00	99.00
4.03.4.03.02.17.065.	PENYEDIAAN DHKP PBB-P2	182,450,000.00	180,771,000.00	99.08
4.03.4.03.02.17.066.	PENYEDIAAN SPPT PBB-P2	187,450,000.00	185,050,000.00	98.72
4.03.4.03.02.17.092.	PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB P2	116,275,000.00	116,246,000.00	99.98
4.03.4.03.02.17.093.	PEMUTAKHIRAN DATABASE PAJAK DAERAH	41,500,000.00	41,254,000.00	99.41
4.03.4.03.02.17.099.	PENGELOLAAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	52,000,000.00	51,640,000.00	99.31
4.03.4.03.02.17.103.	PELAPORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	91,400,000.00	75,034,500.00	82.09
4.03.4.03.02.17.110.	EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	124,450,000.00	123,485,000.00	99.22
4.03.4.03.02.17.111.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGELOLA PAJAK	49,050,000.00	48,811,000.00	99.51
4.03.4.03.02.17.114.	KOORDINASI DAN REKONSILIASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	62,555,000.00	62,555,000.00	100.00
4.03.4.03.02.17.115.	PENYAMPAIAN INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	71,350,000.00	71,000,000.00	99.51
4.03.4.03.02.17.116.	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	53,835,000.00	53,835,000.00	100.00
4.03.4.03.02.17.118.	PEMELIHARAAN APLIKASI PENDAPATAN DAERAH	50,950,000.00	50,560,000.00	99.23
4.03.4.03.02.17.119.	PENGEMBANGAN APLIKASI PAJAK DAERAH (TI)	248,500,000.00	245,120,000.00	98.64
4.03.4.03.02.17.120.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN HADIAH BAGI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH (PELAYANAN IBADAH)	233,256,000.00	229,137,500.00	98.23
4.03.4.03.02.17.122.	PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI	387,875,200.00	384,922,500.00	99.24

	PBB DAN BPHTB			
4.03.4.03.02.17.127.	REKONSILIASI PENDAPATAN DAN PIUTANG PBB DAN BPHTB	175,000,000.00	139,357,000.00	79.63
4.03.4.03.02.17.128.	OPTIMALISASI PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PBB DAN BPHTB	92,150,000.00	81,127,000.00	88.04
4.03.4.03.02.17.129.	CLEANSING DATA PIUTANG PAJAK PBB-P2	62,000,000.00	61,505,000.00	99.20
4.03.4.03.02.17.130.	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG ADMINISTRASI PBB	200,859,050.00	198,517,000.00	98.83
4.03.4.03.02.17.132.	PENDATAAN INDIVIDUAL SUBJEK DAN OBJEK PBB P2	66,050,000.00	66,040,000.00	99.98
4.03.4.03.02.17.133.	INTENSIFIKASI POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	122,355,000.00	121,769,000.00	99.52
4.03.4.03.02.17.135.	PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP PERENCANAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	71,870,000.00	70,710,000.00	98.39
4.03.4.03.02.17.136.	PENYUSUNAN REGULASI PENDAPATAN DAERAH	138,450,000.00	138,450,000.00	100.00
4.03.4.03.02.17.137.	PENGLOLAAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	102,450,000.00	102,308,000.00	99.86

Dari uraian tabel di atas, dalam rangka pencapaian target PAD Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dihadapkan dengan beberapa faktor kendala yaitu :

1. Perlu Evaluasi Peraturan Daerah
2. Sarana dan prasarana pendukung masih kurang dalam rangka operasional pemungutan Pajak Daerah
3. Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi masih kurang
4. SDM yang relatif masih kurang kompetensinya.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut melakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Menyusun Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
2. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD/PBB
3. Melakukan Sosialisasi, monitoring dan pembinaan secara terus menerus terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
4. Melengkapi sarana pendukung melalui Bimbingan Teknis dan Diklat teknis.

Untuk mengukur kinerja aspek keuangan, dilakukan melalui perhitungan efisiensi dan efektifitas kegiatan stratejik. Analisis *Efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Sedangkan *Analisis efektivitas* dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output* baik untuk rencana maupun realisasi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dengan hasil (*outcomes*).

Dari hasil analisis efisiensi dan efektivitas, kinerja keuangan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dinilai **“efektif”** dan **“efisien”**. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, tetapi seluruh target program dan kegiatan bisa tercapai dengan optimal. Adanya sisa anggaran yang dikembalikan ke kas Negara menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dinilai efisien.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam **Lampiran 4 Perhitungan Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Strategik**.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 - 2019 adalah terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk mendukung pembangunan yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Organisasi selama Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran kinerja, dapat diketahui bahwa sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut rata-rata mencapai sasaran 100% dengan kriteria “**BAIK**” kecuali untuk sasaran dua dengan capaian kriteria “**CUKUP**”. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja organisasi baik yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) serta dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) secara umum mencapai sasaran yang diharapkan.

Capaian indikator kinerja sasaran strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2017 berdasarkan perhitungan efisiensi dan efektivitas kegiatan strategik menunjukkan bahwa, dari indikator kinerja (*Input*, *Output* dan *Outcome*) yang berkaitan dengan misi kesatu, kedua, ketiga dan seluruh indikator kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan indikasi kinerja **EFEKTIF** dan **EFISIEN**. Hal ini berarti bahwa realisasi anggaran Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah sesuai dengan tujuan dimana realisasi masukan (*input*) telah sesuai dengan target (*output*) kegiatan dan telah menunjukkan kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcome*). Meskipun begitu, masih ada sejumlah indikator yang belum mencapai sasaran sehingga perlu ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai perwujudan penilaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban SKPD. Pencapaian sasaran dan tujuan peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal, karena masih banyak permasalahan internal dan eksternal yang harus dituntaskan pada tahun berikutnya dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Pendapatan Daerah kedepan.

Dukungan sumber daya, baik personil, pembiayaan dan perlengkapan juga akan terus ditingkatkan baik kualitas, kuantitas maupun kompetensinya sebagai dampak positif bagi pengembangan sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

## **B. PERMASALAHAN DAN SARAN**

Tahun 2017 merupakan tahun pertama RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019. dimana telah dilaksanakan 7 program yang diwujudkan ke dalam 59 kegiatan. Selain permasalahan yang bersifat administratif, yang menjadi hambatan pencapaian target kinerja tahun 2017 diantaranya adalah:

- Masih terbatasnya anggaran kegiatan sehingga belum menyentuh seluruh komponen masyarakat wajib pajak
- Terbatasnya SDM dan dana operasional kegiatan
- Belum optimalnya pembinaan, monitoring dan pengawasan kegiatan sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan wilayah kerja yang luas
- Tidak semua kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja dan RENSTRA dapat dilaksanakan diakibatkan keterbatasan anggaran pemerintah daerah
- Belum optimalnya koordinasi ditingkat perencanaan dan pelaksana kebijakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah belum seluruhnya berkesinambungan dengan kegiatan yang dilaksanakan propinsi/pusat.

Saran untuk menghadapi permasalahan dan kendala diatas strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM



2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penagihan dan penyeteroran terutama pengadaan aplikasi dan software perpajakan.
3. Peningkatan koordinasi dengan Dinas/unit kerja terkait dalam pengelolaan PAD terutama pengelolaan retribusi daerah sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Untuk meminimalisasi hambatan dan kendala dalam pencapaian target, maka untuk tahun berikutnya perlu dilakukan langkah antisipatif dengan melakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi sejumlah celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja yang lebih efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Langkah antisipatif yang bisa dilakukan antara lain:

- Mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan aparatur serta peningkatan jumlah tenaga teknis;
- Optimalisasi pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara sesuai ketersediaan anggaran;
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- Meningkatkan sinergitas antara perencanaan dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah
- Meningkatkan koordinasi ditingkat perencanaan dan pelaksana kebijakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan propinsi/pusat.

### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Dengan demikian, strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang masih perlu lebih teliti dalam merumuskan indikator kinerja beserta target kinerja. Salah satunya adalah dengan memperhatikan faktor-faktor yang meliputi :

- (1) Tugas pokok dan fungsi organisasi;
- (2) Program kerja yang menjadi issue strategis pembangunan daerah;

- (3) Aktivitas organisasi yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut; dan
- (4) Aspirasi masyarakat dan para *stakeholder*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2017 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja Badan Tahun 2017 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017.

Garut,        Februari 2018  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN GARUT

**U. BASUKI EKO. SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661230 199703 1 002

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PERKIN/PK) TA. 2017
- Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2017
- Lampiran 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2017
- Lampiran 4. Perhitungan Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Strategik Tahun 2017

LAMPIRAN : 1

**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	1	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkat 7,9%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah	1	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori BB
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori Baik

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.625.764.782,00	DAU
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.272.449.354,00	DAU
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 64.850.000,00	DAU
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp. 22.334.000,00	DAU
5	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Rp. 32.753.750,00	DAU
6	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 40.000.000,00	DAU
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Rp. 4.908.481.430,00	DAU

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2017**

INSTANSI **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

VISI : " Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas".

MISI 1 : 1. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA																		KET	
		Masukan								Keluaran					Hasil						
		Dana				Waktu															
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Rp	116.275.000	116.246.000	99,98	bulan	12	12	100	Jumlah desa yang terpelihara basis data PBB P2	Objek Pajak	19	19	100	Jumlah basis data objek dan subjek PBB P2 (bangunan standar) yang akurat di 19 desa	Objek Pajak	5.000	5.000	100		
	Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2	Rp	66.050.000	66.040.000	99,98	bulan	12	12	100	Jumlah dokumen updating data yang beralih fungsi	dokumen	1	1	100	Jumlah Updating data objek pajak PBB P2 yang beralih fungsi (bangunan non standar)	Objek Pajak	50	50	100		
	Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	Rp	387.875.200	384.922.500	99,24	bulan	12	12	100	Jumlah Kolektor yang dibina	orang	1.768	1.768	100	Jumlah Kecamatan dan desa yang dibina	Kecamatan/Desa	442	442	100		
	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Rp	323.592.000	317.008.000	97,97	bulan	12	12	100	Jumlah wajib pajak yang dibina	Wajib pajak	230	230	100	Jumlah jenis pajak daerah yang dibina	Jenis Pajak	9	9	100		
	Cleansing data piutang pajak PBB P2	Rp	62.000.000	61.505.000	99,20	bulan	12	12	100	Jumlah desa dengan piutang pajak yang dihapuskan	Desa	275	275	100	Jumlah kecamatan penyelesaian piutang PBB	Kecamatan	8	8	100		
	Penerbitan Pajak Daerah	Rp	287.936.000	286.666.500	99,56	bulan	12	12	100	Jumlah Jenis pajak yang diterbitkan	Jenis Pajak	9	9	100	Jumlah wilayah kecamatan penertiban pajak daerah	Kecamatan	42	42	100		
	Pengawasan Pajak Daerah	Rp	166.638.000	165.718.000	99,45	bulan	12	12	100	Jumlah Jenis pengawasan yang dilakukan	Jenis	2	2	100	Jumlah jenis pajak daerah yang meningkat kesadaran dan kepatuhannya	Jenis Pajak	11	11	100		
	Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Rp	122.355.000	121.769.000	99,52	bulan	12	12	100	Jumlah Jenis potensi PAD yang dintensifkan		2	2	100	Jumlah Aparatur tingkat SKPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah	SKPD	54	54	100		
	Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	315.195.000	312.051.000	99,00	bulan	12	12	100	Jumlah formulir pendaftaran dan penetapan pajak daerah per wajib pajak	Berkas		2	2	100	Jumlah sarana administrasi pengelolaan pajak daerah dan jumlah wajib pajak	Jenis Pajak	9	9	100	
	Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Rp	200.859.050	198.517.000	98,83	bulan	12	12	100	Jumlah jenis Dokumen pendukung Pemungutan PBB yang disediakan perdesa/kelurahan	Buku	3	3	100	Jumlah desa dan kelurahan penerima sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Desa/Kelurahan	442	442	100		
	Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Rp	158.920.000	158.913.000	100,00	bulan	12	12	100	Jumlah jenis Dokumen Pemungutan PBB yang disampaikan perdesa/kelurahan	Buku	5	5	100	Jumlah wilayah penyebaran sarana administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Kecamatan, Desa/Kelurahan	484	484	100		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Rp	174.895.230	172.912.681	98,87	bulan	12	12	100	Jumlah formulir pembayaran pajak daerah per wajib pajak	Berkas		2	2	100	Jumlah sarana administrasi jenis pajak daerah lainnya	Jenis Pajak	9	9	100	
	Penyediaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2	Rp	182.450.000	180.771.000	99,08	bulan	12	12	100	Jumlah ketetapan PBB yang disediakan perdesa/kelurahan	Dokumen		1	1	100	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak kecamatan	Kecamatan, Desa/Kelurahan	484	484	100	
Penyediaan SPPT PBB P2	Rp	187.450.000	185.050.000	98,72	bulan	12	12	100	Jumlah surat pemberitahuan pajak terutang yang disediakan perobjek pajak	lembar		1	1	100	Jumlah SPPT wajib pajak Kecamatan, desa dan kelurahan yang diterbitkan	lembar	1.500.000	1.500.000	100		
Pemuktahiran Database Pajak Daerah	Rp	41.500.000	41.254.000	99,41	bulan	12	12	100	Jumlah komputer yang disediakan untuk input data	Unit		5	5	100	Jumlah sarana penunjang input data	Unit	5	5	100		

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA																		KET	
		Masukan								Keluaran						Hasil					
	Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Rp	50.950.000	50.560.000	99,23	bulan	12	12	100	Jumlah aplikasi PBB yang terpelihara	Aplikasi		1	1	100	Jumlah laporan database pajak PBB P2 yang aman	Laporan	1	1	100	
	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Rp	248.500.000	245.120.000	98,64	bulan	12	12	100	Jumlah aplikasi Pajak lainnya yang terpelihara	Aplikasi		1	1	100	Jumlah laporan database pajak daerah lainnya	Laporan	1	1	100	
	Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Rp	102.450.000	102.308.000	99,86	bulan	12	12	100	Jumlah basis data pajak daerah yang dikelola	Aplikasi		2	2	100	Jumlah tenaga outsourcing pengelola aplikasi pajak daerah	Orang	5	5	100	
	Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp	71.870.000	70.710.000	98,39	bulan	12	12	100	Jumlah jenis pajak yang disusun perencanaannya	objek pajak		5	5	100	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	dokumen	1	1	100	
	Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Rp	138.450.000	138.450.000	100,00	bulan	12	12	100	Jumlah jenis produk hukum yang dihasilkan	jenis produk hukum		2	2	100	Jumlah produk hukum Pajak daerah	dokumen	8	8	100	
	Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan	Rp	62.555.000	62.555.000	100,00	bulan	12	12	100	Jumlah rekon pengelolaan pendapatan	bulan		12	12	100	Jumlah wilayah KCP BJB integrasi data pajak daerah	KCP BJB	12	12	100	
	Penyampaian informasi Pajak Daerah	Rp	71.350.000	71.000.000	99,51	bulan	12	12	100	jumlah jenis PAD yang disosialisasikan	jenis PAD		2	2	100	Jumlah sekolah dan Perguruan tinggi dalam penyampaian informasi pajak daerah	lembaga pendidikan	7	7	100	
	Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Rp	53.835.000	53.835.000	100,00	bulan	12	12	100	jumlah jenis PAD yang dikelola	jenis PAD		2	2	100	Jumlah dokumen pengelolaan pajak dan retribusi daerah	dokumen	1	1	100	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2017**

INSTANSI **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

VISI : " Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas".

MISI 2 **2. Meningkatkan Pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja serta sumber daya aparatur yang profesional**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA																		KET
		Masukan								Keluaran					Hasil					
		Dana				Waktu														
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak	Rp	49.050.000	48.811.000	99,51	bulan	12	12	100	Jumlah hari pelaksanaan Bimbingan Teknis	Hari	3	3	100	Jumlah peserta Bimbingan teknis pelayanan pajak	orang	25	25	100	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	40.000.000	0	0,00	bulan	12	0	0	Jumlah peserta yang diberangkatkan	orang	5	0	0	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti	Jenis	2	0	0	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	22.334.000	13.994.000	62,66	bulan	12	12	100	Jumlah bulan pemenuhan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	bulan	4	4	100	Jumlah pemenuhan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Dokumen	2	2	100	
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp	32.753.750	9.170.000	28,00	bulan	12	12	100	Jumlah bulan pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	Dokumen	3	3	100	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	Dokumen	2	2	100	
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Rp	52.000.000	51.640.000	99,31	bulan	12	12	100	Jumlah triwulan pembukuan pajak dan retribusi daerah	Laporan	4	4	100	Jumlah pembukuan pajak dan retribusi daerah	Laporan	1	1	100	
	Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	Rp	91.400.000	75.034.500	82,09	bulan	12	12	100	Jumlah triwulan laporan pajak dan retribusi daerah	Laporan	4	4	100	Jumlah laporan pajak dan retribusi daerah	Laporan	2	2	100	
	Evaluasi pendapatan daerah	Rp	124.450.000	123.485.000	99,22	bulan	12	12	100	Jumlah triwulan laporan evaluasi pendapatan daerah	Laporan	4	4	100	Jumlah laporan evaluasi pendapatan daerah	Laporan	1	1	100	
	Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Rp	175.000.000	139.357.000	79,63	bulan	12	12	100	Jumlah bulan laporan rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Laporan	12	12	100	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Laporan	2	2	100	
	Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Rp	92.150.000	81.127.000	88,04	bulan	12	12	100	Jumlahbulan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Laporan	12	12	100	Jumlah dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB	Laporan	2	2	100	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	15.000.000	2.448.000	16,32	bulan	12	12	100	Jumlah benda pos yang disediakan materai yang disediakan	Lembar	1	1	100	Jumlah materai yang disediakan	Lembar	3360	484	14,4	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	66.000.000	56.564.576	85,70	bulan	12	12	100	Jumlah Rekening pembayaran rekening telepon dan air	Bulan	24	24	100	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon dan air	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp	107.006.000	102.506.000	95,79	bulan	12	12	100	Jumlah jenis rekonsiliasi dokumen penatausahaan keuangan	Dokumen	8	8	100	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	Dokumen	4	4	100	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	18.950.000	18.933.700	99,91	bulan	12	12	100	Jumlah gedung yang dibersihkan	bangunan	7	7	100	Jumlah pegawai cleaning servis	Orang	2	2	100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	277.820.000	276.582.354	99,55	bulan	12	12	100	Jumlah jenis peralatan kantor	Jenis	25	25	100	Jumlah jenis peralatan kantor	Jenis	25	25	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	134.466.812	131.877.948	98,07	bulan	12	12	100	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	15	15	100	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	15	15	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	25.180.000	25.179.000	100,00	bulan	12	12	100	Tambahan jumlah komponen instalasi listrik	Buah	316	316	100	Tambahan jumlah komponen instalasi listrik	Buah	316	316	100	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA																	KET	
		Masukan							Keluaran				Hasil							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	522.739.970	498.222.669	95,31	bulan	12	12	100	tambahan Jumlah peralatan kantor	Unit	10	10	100	tambahan Jumlah peralatan kantor	Unit	10	10	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	27.252.000	24.981.000	91,67	bulan	12	12	100	Jumlah jenis surat kabar selama 1 tahun	Jenis	3	3	100	Jumlah surat kabar selama 1 tahun	Exemplar	8328	8328	100	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	163.950.000	97.235.000	59,31	bulan	12	12	100	Jumlah jenis  mamin yang disediakan	Jenis	3	3	100	Jumlah bulan pelaksanaan mamin	Bulan	12	12	100	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	160.000.000	141.758.742	88,60	bulan	12	12	100	Jumlah jenis  pelaksanaan perjalanan dinas ke luar kabupaten	Jenis	2	2	100	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar kabupaten	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	Rp	62.400.000	62.400.000	100,00	bulan	12	12	100	Jumlah TKK yang aktif di Bapenda	Orang	12	12	100	Jumlah TKK yang aktif di Bapenda	Orang	12	12	100	
	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya	Rp	45.000.000	40.500.000	90,00	bulan	12	12	100	Jumlah kesatuan pengamanan yang disediakan	Jenis	1	1	100	Jumlah tenaga keamanan kantor	Orang	9	9	100	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp	32.850.000	31.250.000	95,13	bulan	12	12	100	Jumlah pakaian seragam batik pegawai	Stel	120	120	100	Jumlah pakaian seragam batik pegawai	Stel	120	120	100	
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Rp	32.000.000	31.157.000	97,37	bulan	12	12	100	Jumlah mesin absensi pegawai yang beroperasi di Bapenda	Unit	3	3	100	Jumlah mesin absensi pegawai yang beroperasi di Bapenda	Unit	3	3	100	
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Rp	212.375.000	212.091.000	99,87	bulan	12	12	100	Jumlah aplikasi yang dikelola	aplikasi	1	1	100	Jumlah Tenaga Kerja outsourcing administrasi pelayanan PBB yang memadai	orang	10	10	100	
	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Rp	284.849.950	283.942.950	99,68	bulan	12	12	100	jumlah formulir keberatan dan pelayanan yang disediakan	Jenis	12	12	100	Persentase penanganan keberatan dan pelayanan Subjek dan Objek pajak daerah yang terpenuhi	%	100%	100%	100	
	Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	Rp	233.256.000	229.137.500	98,23	bulan	12	12	100	Jumlah jenis Aparatur Pajak desa yang diberi penghargaan	Jenis Aparatur Pajak	1	1	100	Jumlah Aparatur Pajak yang diberi penghargaan	Aparatur Pajak	1250	1250	100	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	249.450.000	243.576.020	97,65	bulan	12	12	100	Jumlah ruangan yang dilengkapi perlengkapan gedung kantor	Unit	2	2	100	Jumlah ruangan yang dilengkapi perlengkapan gedung kantor	Unit	2	2	100	
	Pengadaan Mebeulair	Rp	180.959.354	166.912.000	92,24	bulan	12	12	100	Jumlah Mebeulair yang terealisasi	Unit	5	5	100	Jumlah Mebeulair yang terealisasi	Unit	5	5	100	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	89.140.000	86.628.000	97,18	bulan	12	12	100	Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara	jenis	2	2	100	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit	12	12	100	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp	195.000.000	193.614.000	99,29	bulan	12	12	100	Jumlah Ruangn Yang dipelihara	Ruangan	5	5	100	Jumlah Ruangn Yang dipelihara	Ruangan	5	5	100	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp	200.000.000	198.955.000	99,48	bulan	12	12	100	Jumlah ruangan pelayanan yang direhab	Unit	1	1	100	Jumlah ruangan pelayanan yang direhab	Unit	1	1	100	
	Pembuatan Detail Enggeneering Design (DED) Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor	Rp	40.000.000	39.545.000	98,86	bulan	12	12	100	Jumlah dokumen perencanaan gedung yang direhabilitasi	Unit	1	1	100	Jumlah dokumen perencanaan gedung yang direhabilitasi	Unit	1	1	100	
	Penambahan Lokal Ruangn Gedung kantor	Rp	51.450.000	51.191.000	99,50	bulan	12	12	100	Jumlah ruangan baru yang dibangun	unit	1	1	100	Jumlah ruangan baru yang dibangun	unit	1	1	100	
	Penataan Interior Gedung Kantor	Rp	200.000.000	199.090.000	99,55	bulan	12	12	100	Jumlah interior gedung pelayanan yang dipasang	unit	1	1	100	Jumlah interior gedung pelayanan yang dipasang	unit	1	1	100	
	Penataan Halaman Gedung Kantor	Rp	66.450.000	65.985.000	99,30	bulan	12	12	100	Jumlah nama identitas kantor yang terpasang	unit	1	1	100	Jumlah nama identitas kantor yang terpasang	unit	1	1	100	



## PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017

**INSTANSI** : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

**VISI** : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas”.

SASARAN							KET.
NO	URAIAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	1	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	8	26,35	333,54	
			<b>Rata-rata capaian</b>			<b>333,54</b>	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah	1	Nilai hasil evaluasi SAKIP	BB	B	75%	
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK	BAIK	100%	
			<b>Rata-rata capaian</b>			<b>88%</b>	

## PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN STRATEGIK

**INSTANSI**                      **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**V I S I**                      : “ Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas”.

PROGRAM		KEGIATAN		Input		Output		Outcome		Unit Cost Output		Unit Cost Outcome		Hasil Perhitungan		Indikasi	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Efisien	Efektif
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	116.275.000	116.246.000	19	19	5.000	5.000	6.119.737	6.118.211	0,0038	0,0038	100,02	100,00	Efisien	Efektif
		2	Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2	66.050.000	66.040.000	1	1	50	50	66.050.000	66.040.000	0,02	0,02	100,02	100,00	Efisien	Efektif
		3	Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	387.875.200	384.922.500	1.768	1.768	442	442	219.386	217.716	4,00	4,00	100,76	100,00	Efisien	Efektif
		4	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	323.592.000	317.008.000	230	230	9	9	1.406.922	1.378.296	25,56	25,56	102,03	100,00	Efisien	Efektif
		5	Cleansing data piutang pajak PBB P2	62.000.000	61.505.000	275	275	8	8	225.455	223.655	34,38	34,38	100,80	100,00	Efisien	Efektif
		6	Penertiban Pajak Daerah	287.936.000	286.666.500	9	9	42	42	31.992.889	31.851.833	0,21	0,21	100,44	100,00	Efisien	Efektif
		7	Pengawasan Pajak Daerah	166.638.000	165.718.000	2	2	11	11	83.319.000	82.859.000	0,18	0,18	100,55	100,00	Efisien	Efektif
		8	Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	122.355.000	121.769.000	2	2	54	54	61.177.500	60.884.500	0,04	0,04	100,48	100,00	Efisien	Efektif
		9	Pengelolaan Pajak Daerah	315.195.000	312.051.000	2	2	9	9	157.597.500	156.025.500	0,22	0,22	101,00	100,00	Efisien	Efektif
		10	Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	200.859.050	198.517.000	3	3	442	442	66.953.017	66.172.333	0,01	0,01	101,17	100,00	Efisien	Efektif
		11	Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	158.920.000	158.913.000	5	5	484	484	31.784.000	31.782.600	0,01	0,01	100,00	100,00	Efisien	Efektif
		12	Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	174.895.230	172.912.681	2	2	9	9	87.447.615	86.456.341	0,22	0,22	101,13	100,00	Efisien	Efektif

[illegible]

PROGRAM		KEGIATAN		Input		Output		Outcome		Unit Cost Output		Unit Cost Outcome		Hasil Perhitungan		Indikasi	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Efisien	Efektif
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	28	Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	52.000.000	51.640.000	4	4	1	1	13.000.000	12.910.000	4,00	4,00	100,69	100,00	Efisien	Efektif
		29	Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	91.400.000	75.034.500	4	4	2	2	22.850.000	18.758.625	2,00	2,00	117,91	100,00	Efisien	Efektif
		30	Evaluasi pendapatan daerah	124.450.000	123.485.000	4	4	1	1	31.112.500	30.871.250	4,00	4,00	100,78	100,00	Efisien	Efektif
		31	Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	175.000.000	139.357.000	12	12	2	2	14.583.333	11.613.083	6,00	6,00	120,37	100,00	Efisien	Efektif
		32	Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	92.150.000	81.127.000	12	12	2	2	7.679.167	6.760.583	6,00	6,00	111,96	100,00	Efisien	Efektif
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	2.448.000	1	1	3360	484	15.000.000	2.448.000	0,00	0,00	183,68	(494,21)	Efisien	Inefektif
		34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	56.564.576	24	24	12	12	2.750.000	2.356.857	2,00	2,00	114,30	100,00	Efisien	Efektif
		35	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.006.000	102.506.000	8	8	4	4	13.375.750	12.813.250	2,00	2,00	104,21	100,00	Efisien	Efektif
		36	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.950.000	18.933.700	7	7	2	2	2.707.143	2.704.814	3,50	3,50	100,09	100,00	Efisien	Efektif
		37	Penyediaan Alat Tulis Kantor	277.820.000	276.582.354	25	25	25	25	11.112.800	11.063.294	1,00	1,00	100,45	100,00	Efisien	Efektif
		38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.466.812	131.877.948	15	15	15	15	8.964.454	8.791.863	1,00	1,00	101,93	100,00	Efisien	Efektif
		39	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	25.180.000	25.179.000	316	316	316	316	79.684	79.680	1,00	1,00	100,00	100,00	Efisien	Efektif
		40	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	522.739.970	498.222.669	10	10	10	10	52.273.997	49.822.267	1,00	1,00	104,69	100,00	Efisien	Efektif
		41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	27.252.000	24.981.000	3	3	8328	8328	9.084.000	8.327.000	0,00	0,00	108,33	100,00	Efisien	Efektif
		42	Penyediaan Makanan dan Minuman	163.950.000	97.235.000	3	3	12	12	54.650.000	32.411.667	0,25	0,25	140,69	100,00	Efisien	Efektif
		43	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	160.000.000	141.758.742	2	2	12	12	80.000.000	70.879.371	0,17	0,17	111,40	100,00	Efisien	Efektif
		44	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	62.400.000	62.400.000	12	12	12	12	5.200.000	5.200.000	1,00	1,00	100,00	100,00	Efisien	Efektif
		45	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya	45.000.000	40.500.000	1	1	9	9	45.000.000	40.500.000	0,11	0,11	110,00	100,00	Efisien	Efektif

PROGRAM		KEGIATAN		Input		Output		Outcome		Unit Cost Output		Unit Cost Outcome		Hasil Perhitungan		Indikasi	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Efisien	Efektif
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Peningkatan Disiplin Aparatur	46	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	32.850.000	31.250.000	120	120	120	120	273.750	260.417	1,00	1,00	104,87	100,00	Efisien	Efektif
		47	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	32.000.000	31.157.000	3	3	3	3	10.666.667	10.385.667	1,00	1,00	102,63	100,00	Efisien	Efektif
9	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	48	Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	212.375.000	212.091.000	1	1	10	10	212.375.000	212.091.000	0,10	0,10	100,13	100,00	Efisien	Efektif
		49	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	284.849.950	283.942.950	12	12	100%	100%	23.737.496	23.661.913	12,00	12,00	100,32	100,00	Efisien	Efektif
		50	Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	233.256.000	229.137.500	1	1	1250	1250	233.256.000	229.137.500	0,00	0,00	101,77	100,00	Efisien	Efektif
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	249.450.000	243.576.020	2	2	2	2	124.725.000	121.788.010	1,00	1,00	102,35	100,00	Efisien	Efektif
		52	Pengadaan Mebeulair	180.959.354	166.912.000	5	5	5	5	36.191.871	33.382.400	1,00	1,00	107,76	100,00	Efisien	Efektif
		53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	89.140.000	86.628.000	2	2	12	12	44.570.000	43.314.000	0,17	0,17	102,82	100,00	Efisien	Efektif
		54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	195.000.000	193.614.000	5	5	5	5	39.000.000	38.722.800	1,00	1,00	100,71	100,00	Efisien	Efektif
		55	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	200.000.000	198.955.000	1	1	1	1	200.000.000	198.955.000	1,00	1,00	100,52	100,00	Efisien	Efektif
		56	Pembuatan Detail Enggeneering Design (DED) Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor	40.000.000	39.545.000	1	1	1	1	40.000.000	39.545.000	1,00	1,00	101,14	100,00	Efisien	Efektif
		57	Penambahan Lokal Ruang Gedung kantor	51.450.000	51.191.000	1	1	1	1	51.450.000	51.191.000	1,00	1,00	100,50	100,00	Efisien	Efektif
		58	Penataan Interior Gedung Kantor	200.000.000	199.090.000	1	1	1	1	200.000.000	199.090.000	1,00	1,00	100,46	100,00	Efisien	Efektif
		59	Penataan Halaman Gedung Kantor	66.450.000	65.985.000	1	1	1	1	66.450.000	65.985.000	1,00	1,00	100,70	100,00	Efisien	Efektif